

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja UMKM Se - Kabupaten Badung

Ida Ayu Bintang Puja Kusuma Sari

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit-Denpasar Timur, Denpasar
e-mail: pujadayubintang08@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to test and analyze empirically the influence of Government policy and social capital on the performance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The population used in this research were MSMEs in Badung Regency, totaling 1,367 MSMEs. The sampling method in this research uses a probability sampling method using a stratified random sampling technique. The samples were determined using the Slovin formula, and the samples were 93 respondents. The data was collected using a survey method by distributing research questionnaires to business actors. The study showed that the performance of MSMEs in Badung District is influenced by government policy, where the better the implementation of government policy towards MSMEs, the greater the increase in business performance. Social capital has a positive but not significant influence on the performance of MSMEs. The culture of cooperation between business actors has begun to erode, they tend to be more individualistic in building businesses and there is a lack of interaction between business actors and customers.

Keywords: *government policy, social capital, MSME performance*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah fokus utama bagi negara berkembang seperti Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek kunci dalam pembangunan nasional adalah ekonomi, karena dapat memengaruhi pertumbuhan dan stabilitas negara. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya sebagai sumber pendapatan negara serta penciptaan lapangan kerja. Pemerintah memberikan perhatian dan prioritas khusus kepada UMKM karena perannya yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. UMKM tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Hal ini disebabkan karena UMKM merupakan fondasi dari sistem ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat yang lebih luas. Tujuannya tidak hanya terbatas pada mengatasi disparitas pendapatan dan kesenjangan antara berbagai kelompok masyarakat serta pelaku usaha, juga bukan hanya dalam hal mengurangi tingkat kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Dengan kata lain, UMKM tidak hanya berperan sebagai solusi untuk masalah sosial ekonomi, tetapi juga sebagai agen penggerak utama dalam mengubah pola ekonomi yang ada menuju ke arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

UMKM memiliki kontribusi dalam pembangunan baik di sector nasional dan daerah. Khusus di Kabupaten Badung, Kepala dinas koperasi Kab Badung yaitu I Made Widiana menegaskan bahwa para pelaku UMKM di wilayah Badung ikut andil untuk memajukan ekonomi

masyarakat dan menyediakan peluang kerja. (<https://bali.antaranews.com/berita/316836/umkm-terus-gerakkan-ekonomi-kabupaten-badung>). Namun disisi lain, ditemukan fakta bahwa terdapat isu ancaman resesi ekonomi global yang mengancam sektor UMKM di Kabupaten Badung. Di kutip dari Redaksi majalahfakta.id (2023), bahwa Daerah (Sekda) Kab. Badung yaitu I Wayan Adi Arnawa, menjelaskan bahwa sebagai tindakan pencegahan menghadapi potensi resesi ekonomi global yang disebabkan oleh krisis pangan dan krisis energi, Pemerintah setempat telah merumuskan strategi dan arah kebijakannya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan investasi di daerah, dengan tujuan mewujudkan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan daya saing daerah.

Kontribusi sector umkm yang begitu besar dalam perekonomian nasional maupun daerah, menuntut para pelaku UMKM harus benar-benar memperhatikan kinerja yang dimilikinya. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis dapat dilihat melalui kinerja usaha. Kinerja merupakan sejauh mana pencapaian baik dalam hal kualitas dan jumlah pekerjaan yang dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada individu (Asyriyanti & Hanifah, 2023). Kinerja usaha adalah keberhasilan seseorang dalam mencapai atau menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi Pramestiningrum & Iramani (2020). Kinerja mempengaruhi tingkat usaha yang dilakukan dan kesesuaiannya terhadap pencapaian yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa untuk dapat meningkatkan kinerja UMKM, peran kebijakan pemerintah dan modal sosial sangatlah penting dimiliki oleh para pelaku UMKM.

Istilah "konsep kebijakan pemerintah" mengacu pada berbagai Langkah yang dilakukan pemerintah guna mendukung pertumbuhan usaha kecil di berbagai sektor. Tujuan dari kebijakan ini tidak terbatas hanya pada memberikan keuntungan kepada perusahaan itu sendiri, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas pada perekonomian makro, seperti dukungan terhadap usaha kecil, meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mengurangi tingkat pengangguran, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah terhadap usaha kecil berfokus pada tiga aspek utama: menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung, menyesuaikan regulasi agar seimbang, dan menyediakan informasi serta dukungan bagi perkembangan usaha kecil. Pemerintah percaya bahwa usaha kecil memiliki kemampuan untuk merencanakan masa depan dan melakukan investasi jangka panjang ketika diberikan kondisi yang sesuai melalui kebijakan yang tepat. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam pengembangan UMKM, yang ditujukan dengan adanya intervensi pemerintah melalui regulasi dan deregulasi yang tertuang

dalam peraturan dan perundang-undangan, yang meliputi: “UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, PP Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Inpres Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan, Keppres Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan” (Sombolayuk, 2023).

Beberapa hasil penelitian terkait kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja UMKM dikemukakan oleh Azis & Senimantara (2019); Farhan et al. (2023); Sombolayuk (2023). Hasil penelitian dari Hadi & Purwati (2020) dan Pramestiningrum & Iramani (2020) mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tidak memiliki dampak terhadap kinerja UMKM.

Selain kebijakan pemerintah, factor modal sosial juga perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM. Menurut Akintimehin et al. (2019) modal sosial dari internal dan eksternal berdampak signifikan pada kinerja perusahaan. Modal sosial adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperoleh melalui interaksi dan hubungan dengan perusahaan lain. Peran modal sosial ini sangat penting dalam meningkatkan daya saing suatu bisnis. Karena itu, modal sosial menjadi aset kunci yang perlu dimiliki oleh pengusaha UMKM. Dengan memiliki modal sosial yang kuat, pengusaha UMKM dapat meningkatkan semangat kewirausahaan mereka dan mengelola usaha mereka dengan lebih efektif dan efisien Hadi & Purwati (2020). Modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari kepercayaan yang umumnya hadir di dalam suatu masyarakat atau segmen tertentu dari masyarakat tersebut. Ide ini juga bisa dimaknai sebagai kumpulan nilai atau norma informal yang dipatuhi bersama oleh individu dalam suatu kelompok, yang membantu dalam memfasilitasi kerja sama di antara mereka. Beberapa hasil penelitian terkait pengaruh modal sosial dalam meningkatkan kinerja UMKM dikemukakan oleh Hair et al. (2019); Fanani & Fitrayati (2021); Asyriyanti & Hanifah (2023).

Melihat pentingnya peran sector UMKM dalam perekonomian nasional maupun daerah, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini untuk menjawab permasalahan utama yang berkenaan dengan pengaruh kebijakan pemerintah dan modal sosial terhadap kinerja usaha mikro kecil menengah dengan mengambil studi UMKM se Kabupaten Badung.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stewardship adalah perspektif baru terkait manajemen organisasi dan individu yang terlibat di dalamnya. Konsep stewardship menekankan pada kolaborasi, pemberdayaan, kemitraan, kepercayaan, dan pelayanan sebagai prinsip utama. Prinsip-prinsip ini menjadi fokus dalam pengembangan teori Stewardship. Dalam pendekatan ini, manajemen tidak hanya memprioritaskan kepentingan individu, tetapi juga mengutamakan hasil yang menguntungkan bagi organisasi secara keseluruhan. Pada kajian ini, manajemen mencakup perangkat atau staf desa, bertindak sebagai steward atau pengelola yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada mereka. Donalson dan Davis (1991) dalam Walenta (2019) menjelaskan Teori Stewardship dijadikan landasan teori pada kajian ini karena teori ini menjadi akar psikolog dan menerangkan kondisi di mana pelaku UMKM akan bertindak sesuai apa yang menjadi tujuan dari usahanya dan berperilaku dengan penuh kesadaran serta bijaksana sehingga menghasilkan kinerja usaha yang baik, sehingga bisnis yang dibangun akan mampu tumbuh dan berkembang.

Menurut PP No 7 Tahun 2021 bahwa “kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang”. Adapun kriteria yang dipergunakan menurut PP No 7 Tahun 2021, yakni mengenai omset usaha mikro 2 milyar/tahun, usaha kecil berkisar 2-15 milyar/tahun, dan untuk usaha menengah berkisar dari 5-50 milyar/tahun.

Kinerja atau performa adalah gambaran prestasi sebuah perusahaan yang mengindikasikan seberapa jauh perusahaan tersebut berhasil mencapai hasil kerja dalam menjalankan kegiatannya Harini & Handayani (2019). Kinerja perusahaan memiliki dampak yang signifikan dalam mengarahkan pertumbuhan perusahaan ke arah yang lebih baik serta menjaga stabilitasnya.

Kinerja UMKM akan mengalami peningkatan ketika para pengusaha mampu mengelola sumber daya internal secara efektif, menanggapi perubahan pasar secara proaktif, aktif mencari peluang, dan berani mengambil risiko dengan menerapkan ide-ide baru Wijaya & Widjaja (2023). Kinerja yang baik dalam segala aspek, seperti keuangan, produksi, distribusi, dan pemasaran, menjadi syarat penting bagi kelangsungan hidup UMKM. Dengan mencapai kinerja yang optimal, UMKM diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam perekonomian nasional Kasenda & Wijayangka (2019).

Kebijakan Pemerintah

Peran pemerintah menjadi hal penting untuk mengembangkan UKM. Berbagai kebijakan yang diterapkan meliputi serangkaian langkah untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja UKM,

memperkuat dan memperluas peran sistem pendukung usaha, serta meningkatkan dukungan terhadap iklim usaha secara keseluruhan. Kebijakan pemberdayaan ini difokuskan pada dua tingkat, yaitu tingkat makro dan mikro. Di tingkat makro, pemerintah berupaya memperbaiki sistem pendukung usaha, melibatkan lembaga atau sistem yang memberikan dukungan untuk meningkatkan akses UKM terhadap sumber daya produktif, sehingga usaha dapat diperluas dan kinerja meningkat. Sumber daya produktif meliputi materi mentah, modal, pekerja terampil, pengetahuan, dan teknologi. Perluasan usaha meliputi peningkatan dalam struktur organisasi internal, peningkatan kemampuan, dan perluasan ke pasar yang lebih luas. Sebaliknya, kebijakan pemberdayaan UKM di tingkat mikro dengan meningkatkan kualitas struktur organisasi UKM dan meningkatkan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kebijakan tersebut mengarahkan pada pengambilan langkah-langkah khusus yang harus diambil dalam sektor koperasi dan UMKM. Tujuannya adalah guna mengoptimalkan daya saing koperasi dan UMKM sehingga terjadi peningkatan usaha secara berkelanjutan. Hal ini diharapkan akan berkontribusi pada tercapainya kemandirian ekonomi nasional Sombolayuk (2023).

Modal sosial adalah serangkaian interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat, yang meliputi jaringan, kerjasama, dan komunikasi, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup Primadona (2020). Teori inti kesuksesan menekankan bahwa kolaborasi akan menghasilkan motivasi yang tinggi, rasa saling menghormati, dan kepercayaan, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian kesuksesan Wibowo et al. (2022). Pelaku UMKM yang memiliki modal sosial yang kuat lebih cenderung dapat menghasilkan ide-ide inovatif untuk memulai usaha mereka sendiri, dibandingkan dengan mereka yang memiliki modal sosial yang lemah. Konsep modal sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan keberhasilan dan kelangsungan UMKM sebab adanya modal sosial, UMKM dapat dengan lebih mudah mendapat kepercayaan dari berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis mereka. Dengan demikian, tingkat modal sosial yang tinggi membuka akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan dukungan yang sangat penting bagi kesuksesan UMKM Walenta (2019).

Konsep kebijakan pemerintah mengacu pada langkah-langkah dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil di berbagai sektor. Kebijakan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga memiliki efek positif pada perekonomian secara keseluruhan, seperti berkontribusi pada PDB, menekan jumlah pengangguran, serta meningkatkan peluang kerja. Secara esensial, kebijakan pemerintah terhadap usaha kecil mencakup 3 komponen: menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, deregulasi atau pengaturan yang mendukung kesetaraan, serta penyediaan informasi bisnis dan dukungan untuk kemajuan usaha kecil.

Perusahaan kecil memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merencanakan masa depan mereka dan cenderung lebih mungkin untuk melakukan investasi dalam pertumbuhan jangka panjang setelah mendapatkan kondisi yang sesuai melalui kebijakan pemerintah Sombolayuk (2023).

Beberapa hasil penelitian mengenai kebijakan pemerintah berdampak positif pada kinerja UMKM ditemukan oleh Suwarno et al. (2023); Farhan et al. (2023); Sombolayuk (2023). Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, dimana pelaku UMKM harus memanfaatkan kebijakan yang diberikan, maka hipotesis pertama pada studi ini yaitu:

H1: Kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.

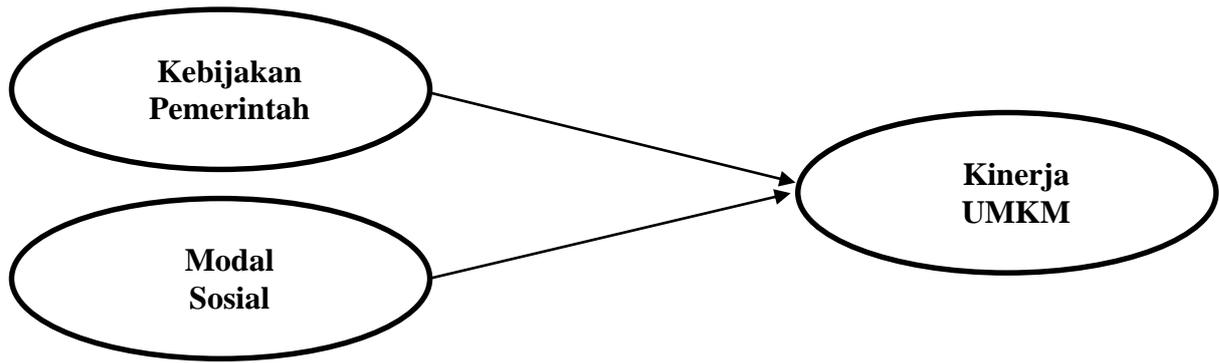
Modal sosial adalah kapabilitas masyarakat untuk bekerja sama berdasarkan kesamaan tertentu, seperti nilai, norma, atau kepentingan bersama, di mana olaborasi ini membentuk ikatan khusus yang menjadi kekuatan penting dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang ekonomi serta dimensi sosial lainnya Walenta (2019). Kunci penting dari modal sosial adalah solidaritas sosial. Dengan fokus pada aspek kebersamaan, modal sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam mencapai berbagai tujuan. Modal sosial berperan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia serta mendukung kinerja UMKM. Hasil penelitian Suriyanti et al. (2023); Fanani & Fitrayati (2021); Asyriyanti & Hanifah (2023) yang menyatakan bahwa modal sosial berdampak positif signifikan pada kinerja UMKM.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, dimana pelaku UMKM harus memiliki modal sosial untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasinya sehingga kinerja usaha yang dihasilkan sesuai dengan tujuan usaha tersebut di bangun, maka hipotesis keduanya adalah:

H2: Modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan modal sosial terhadap kinerja UMKM yang ada di Kabupaten Badung, adapun kerangka konsep penelitian ini tersaji dalam gambar 1.



Gambar 1
 Kerangka Konseptual

Sumber; Hasil Pemikiran Peneliti

Variabel kinerja UMKM diukur dengan indikator yang diadopsi dari Pramestiningrum & Iramani (2020) meliputi beberapa indikator yakni: 1) peningkatan penjualan; 2) peningkatan jumlah konsumen; 3) peningkatan keuntungan; 4) pemasaran; 5) pendanaan. Variabel kebijakan pemerintah diukur dengan 5 indikator yang diadopsi dari Azis & Senimantara (2019) meliputi: 1) fasilitator bisnis UMKM; 2) kemudahan perijinan; 3) program pemerintah mendukung UMKM; 4) tingkat suku bunga; 5) peraturan yang melindungi UMKM. Variabel modal sosial diukur dengan 4 indikator yang diadopsi dari Azis & Senimantara (2019) yang meliputi: 1) menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sosial; 2) menjalin hubungan baik dengan sentra industry; 3) menjalin hubungan baik dengan konsumen; 4) menjalin hubungan baik dengan otoritas pemerintah. Keseluruhan indikator tersebut diukur dengan skala likert 1-5 point.

Populasi pada kajian ini yakni pelaku UMKM di Kabupaten Badung sebanyak 1.367 UMKM. Adapun sampelnya ditentukan berdasarkan rumus slovin dengan level errornya 10%, maka jumlah sampel ditentukan minimal 93 responden. Dipilihnya tingkat kesalahan (error) 10% dikarenakan tingkat eror tersebut merupakan tingkat kesalahan yang masih dapat ditolerir dalam penelitian ilmu social dan masih representative dalam mewakili populasi.

Studi ini menerapkan metode *probability sampling* dengan teknik *stratified random sampling*. Dalam metode ini, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok, sehingga pengambilan sampel merata di seluruh kelompok. Jumlah sampel yang ditentukan untuk setiap kecamatan disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1 Perhitungan Jumlah Sampel Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Sampel
1.	Petang	5	$5/1.367 \times 100\% \times 93 = 1$
2.	Abiansemal	38	$38/1.367 \times 100\% \times 93 = 3$
3.	Kuta Utara	548	$548/1.367 \times 100\% \times 93 = 37$
4.	Kuta	330	$330/1.367 \times 100\% \times 93 = 22$
5.	Kuta Selatan	269	$269/1.367 \times 100\% \times 93 = 18$
6	Mengwi	177	$177/1.367 \times 100\% \times 93 = 12$
Jumlah		1.367	93

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis PLS-SEM yang meliputi model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan cara variabel yang teramati menggambarkan variabel yang tidak teramati yang dinilai, sedangkan model struktural mengungkap kekuatan keterikatan antara variabel yang tidak teramati tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Studi ini bertujuan guna menganalisa pengaruh kebijakan pemerintah dan modal social terhadap kinerja UMKM se Kab. Badung. Pengumpulan data pada studi ini ialah dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 93 kuesioner kepada pelaku usaha, seluruh kuesioner telah terisi lengkap dan selanjutnya akan diproses dengan menggunakan software PLS. didasarkan pada karakteristik usia, bahwa kebanyakan responden berusia 41-50 tahun sebanyak 29 responden atau 31,2%. 2) Jenis kelamin, responden perempuan lebih mendominasi yaitu sebanyak 49 responden atau 52,7%. 3) Karakteristik lama usaha responden dalam penelitian ini didominasi dengan lama usaha diatas 10 tahun sebanyak 60 responden atau 64,5%. 4) Karakteristik berdasarkan pada omset usaha didominasi oleh usaha mikro sebanyak 62 responden atau 66,7%. 5) karakteristik jenis usaha didominasi oleh jenis usaha perdagangan sebanyak 66 responden atau 71,0%. 6) karakteristik Pendidikan responden didominasi dengan Pendidikan SMA sebanyak 45 tahun atau 48,4%.

Uji Model Pengukuran Convergent Validity

Tabel 2 Nilai Outer Loading

Variabel	Indikator	Nilai Korelasi
Kebijakan Pemerintah (X1)	X1.1	0,848
	X1.2	0,915
	X1.3	0,879
	X1.4	0,823
	X1.5	0,835
Modal Sosial (X2)	X2.1	0,863
	X2.2	0,756
	X2.3	0,850
	X2.4	0,788
Kinerja UMKM (Y)	Y1.1	0,850
	Y1.2	0,804
	Y1.3	0,862
	Y1.4	0,861
	Y1.5	0,747

Dalam tabel 2 terlihat seluruh indikator memenuhi ketentuan validitas sesuai kriteria convergent validity yakni nilai outer loading $> 0,60$

Discriminant Validity

Tabel 3 Uji Discriminant Validity

Variabel	AVE	\sqrt{AVE}	Kebijakan Pemerintah (X1)	Modal Sosial (X2)
Kebijakan Pemerintah (X1)	0,741	0,861		
Modal sosial (X2)	0,665	0,815	0,551	
Kinerja UMKM (Y)	0,682	0,826	0,788	0,437

Tabel 3 memperlihatkan nilai AVE semua konstruk $> 0,50$ dan nilai \sqrt{AVE} setiap konstraknya dikisaran 0,815 s.d 0,861 melebihi nilai korelasinya yaitu dikisaran 0,437 s.d 0,788, berarti terpenuhinya persyaratan validitas sesuai kriteria discriminant validity.

Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Tabel 4. Uji Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kebijakan Pemerintah (X1)	0,913	0,934
Modal sosial (X2)	0,833	0,888
Kinerja UMKM (Y)	0,883	0,915

Dalam Tabel 4 ditunjukkan nilai composite reliability dan Cronbach Alpha setiap konstruksya memiliki nilai > 0,60, berarti terpenuhinya ketentuan reliabel.

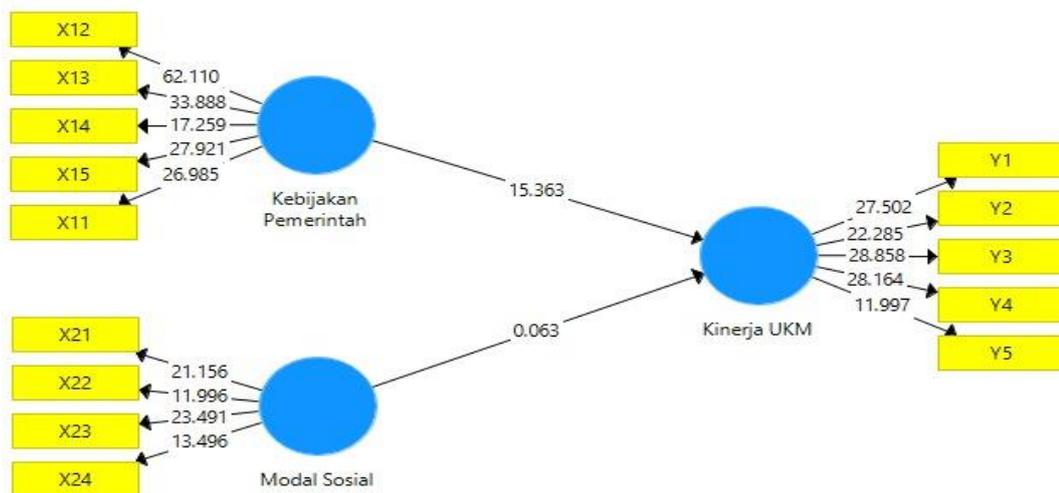
Evaluasi Model Struktural Melalui R-Square (R²) kinerja UMKM menunjukkan nilai 0,621 berdasarkan kriteria Chin Imam & Hengky (2019), maka model tersebut termasuk kriteria model yang moderat cenderung kuat, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan modal social memiliki pengaruh sebesar 62,1% terhadap kinerja UMKM, selebihnya yaitu 37,9% dijelaskan variable lainnya. Selanjutnya Pengujian F-Square mengindikasikan kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh yang kuat sebesar 1,135 terhadap kinerja UMKM, sedangkan modal social memiliki pengaruh yang lemah sebesar 0,000 terhadap kinerja UMKM.

Pengujian Hipotesis,

Tabel 5 *Path Analysis* dan Pengujian Statistik

Variabel	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan hipotesis
Kebijakan Pemerintah -> Kinerja UKM	0,786	15,363	0,000	Diterima
Modal Sosial -> Kinerja UKM	0,005	0,063	0,950	Ditolak

Gambar 2 Bootstrapping Model Struktural Penelitian



Berdasarkan tabel 5 dan gambar 2, Kebijakan pemerintah berdampak positif yaitu 0,786 terhadap kinerja UMKM dan berkorelasi signifikan dimana nilai p values $0,000 < 0,05$, maka hipotesis pertama diterima. Modal sosial berdampak positif yaitu 0,005 pada kinerja UMKM dan

korelasinya tidak signifikan dimana nilai p values $0,950 > 0,05$, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak dapat didukung (H2 ditolak)

Pengaruh kebijakan pemerintah

Berlandaskan hasil pengujian menunjukkan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan pada kinerja UMKM. Sehingga hipotesa pertama (H1) dalam penelitian ini dapat diterima, dimana semakin baik penerapan kebijakan pemerintah terhadap UMKM maka makin meningkat pula kinerjanya. Temuan ini didukung oleh Suwarno et al. (2023); Farhan et al. (2023); Sombolayuk (2023), di mana kebijakan pemerintah berdampak positif signifikan pada kinerja UMKM.

Peran UMKM sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini karena perannya untuk meningkatkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja, hal inilah yang menjadi antusiasme pemerintah dalam melaksanakan deregulasi mengacu pada ide bahwa regulasi sebelumnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kebijakan pemerintah untuk usaha kecil lebih difokuskan pada penyediaan informasi bisnis, pelaksanaan program Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan untuk para pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pelaku UMKM se Kabupaten Badung merasakan keuntungan dari adanya kebijakan pemerintah yang berupa kemudahan perijinan, bantuan modal usaha melalui penyaluran KUR, insentif bunga dan pajak, relaksasi kredit.

Pengaruh modal social

Hasil pengujian mengindikasikan modal sosial berdampak positif namun tidak signifikan pada kinerja UMKM, berarti hipotesis keduanya diterima. berpengaruh positif tidak signifikkannya modal social pada kinerja UMKM memberikan makna bahwa modal social yang dimiliki oleh para pelaku usaha mampu meningkatkan kinerja usahanya namun, peningkatan kinerja tersebut belumlah optimal dirasakan oleh para pelaku usaha. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Hadi (2020); Fanani & Fitriyati (2021); Asyriyanti & Hanifah (2023), yaitu modal sosial berdampak positif signifikan pada kinerja UMKM, tetapi temuan ini sejalan dengan kajian dari Walenta (2019); Suriyanti et al. (2023), modal social berdampak positif namun tidak signifikan pada kinerja usaha.

Modal sosial adalah serangkaian interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat, yang meliputi jaringan, kerjasama, dan komunikasi, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup Primadona (2020). Teori inti kesuksesan menekankan bahwa kolaborasi akan menghasilkan motivasi yang tinggi, rasa saling menghormati, dan kepercayaan Hadi & Purwati (2020). Hasil penelitian ini bahwa para pelaku usaha masih belum optimal dalam menerapkan modal social baik

dengan konsumen maupun dengan sesama pemilik usaha. Tidak adanya hubungan yang dekat antara konsumen dan pelaku usaha, dapat menghambat komunikasi diantara mereka sehingga kurang adanya sikap saling percaya. Selain itu, modal social yang dimiliki antar pelaku usaha (yang usahanya sejenis) juga masih sangat rendah, artinya mereka lebih cenderung menganggap bahwa sesama pelaku usaha merupakan saingan, cenderung lebih individualis dalam mengelola usaha dan bukan merupakan tempat untuk saling berbagi informasi dalam upaya peningkatan usahanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil pengujian diatas, disimpulkan bahwasanya kinerja UMKM se Kecamatan Badung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, dimana semakin baik penerapan kebijakan pemerintah terhadap UMKM maka semakin meningkat pula kinerja usaha. Temuan lain pada kajian ini yaitu modal social memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan pada kinerja UMKM, hal ini diduga budaya kerjasama antar pelaku usaha sudah mulai tergerus, mereka lebih cenderung individualis dalam membangun usaha serta kurangnya interaksi yang dimiliki oleh pelaku usaha dan pelanggan.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah 1) Bagi pelaku usaha untuk lebih memperhatikan modal social karena membangun kerjasama serta jaringan dengan sesama pelaku usaha merupakan salah satu kekuatan bagi UMKM untuk tetap tumbuh dan mampu meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi berbagai permasalahan usaha, 2) Bagi Pemerintah Kabupaten Badung telah memberikan perannya sebagai fasilitator bagi UMKM baik dalam bentuk pengurusan ijin usaha, kebijakan permodalan (KUR), memberikan Pendidikan pelatihan dan workshop mengenai pengelolaan usaha. Peran pemerintah ini menjadi salah satu elemen utama yang mampu meningkatkan kinerja usaha., 3) Bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji penelitian di luar kabupaten lain untuk mengetahui protret perkembangan UMKM dalam upaya peningkatan kinerja usahanya.

Daftar Pustaka

- Akintimehin, O. O., Eniola, A. A., Alabi, O. J., Eluyela, D. F., Okere, W., & Ozordi, E. (2019). "Social capital and its effect on business performance in the Nigeria informal sector". *Heliyon*, 5(7), e02024. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02024>
- Asyriyanti, M., & Hanifah, H. S. (2023). "Peran Modal Sosial Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Garut Kota". *Jurnal Financia: Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 74–82.
- Azis, I. S. A., & Senimantara, I. N. (2019). "The Role of Government Policies in Moderating the Influence of Social Capital and Human Capital on the Performance of SMEs in Denpasar".

- Fanani, Y. K., & Fitrayati, D. (2021). "Pengaruh modal insani dan modal sosial terhadap kinerja UMKM makanan dan minuman di Surabaya". *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 9(3), 84–89.
- Farhan, A., Ramadhani, S., & Yanti, N. (2023). "Pengaruh Aspek Keuangan, Financial Technology, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan". *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 640–662.
- Hadi, S., & Purwati, A. A. (2020). "Modal sosial dan inovasi terhadap kinerja bisnis UMKM". *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(1), 255–262.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2019). "Multivariate data analysis (new international ed.)". Harlow: Pearson Education.
- Harini, C., & Handayani, S. B. (2019). "Pemasaran Kewirausahaan Melalui E-Commerce Untuk Meningkatkan Kinerja Umkm". *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 13(2).
- Imam, G., & Hengky, L. (2019). "Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0". *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Kasenda, B. S., & Wijayangka, C. (2019). "Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM". *Almana: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 153–160.
- Pramestiningrum, D. R., & Iramani, R. (2020). "Pengaruh literasi keuangan, financial capital, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja usaha pada usaha kecil dan menengah di jawa timur". *J. Bus. Bank*, 9(2), 279–296.
- Primadona, P. (2020). "Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keberhasilan wirausaha di Kota Padang". *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis*, 9(2), 55–73.
- Sombolayuk, W. (2023). "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Perusahaan Ukm". *SIMAK*, 21(01), 37–55.
- Suriyanti, L. H., Ramdani, D., Ameliya, A., & Romadhon, B. (2023). "Modal sosial, kepemimpinan kewirausahaan dan kinerja UMKM di Pekanbaru: Pengaruh mediasi kemampuan inovasi". *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(11), 1338–1344.
- Suwarno, S., Lustrilanang, P., & Sunardi, S. (2023). "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Desa, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa: Studi Empiris Kecamatan Ciawi". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 165–174.
- Walenta, A. S. (2019). "Pengaruh Modal Sosial Terhadap Peningkatan Kinerja Pada UMKM Rumah Makan di Kota Tentena Kabupaten Poso The Influence of Social Capital Againts Performance Improvement in SMES Restaurant in the City of Tentena, Poso Regency". *Pinisi Business Administration Review*, 1(2), 125–136.
- Wibowo, H. A., Andayani, T. B. N., Ikhwan, K., Rahardjo, B., & Atmaja, H. E. (2022). "Modal Sosial dengan Pendekatan Structural Equation Model". *UMMagelang Conference Series*, 1038–1049.
- Wijaya, W., & Widjaja, O. H. (2023). "Pengaruh Penggunaan Aplikasi E-Commerce dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja UMKM". *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 5(1), 84–93.